



**RANCANGAN AWAL**

# **RENCANA KERJA**

**DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA,  
DAN TATA RUANG  
KAB. PINRANG  
TAHUN 2024**

**DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG  
KAB. PINRANG  
TAHUN ANGGARAN 2023**

The background features a complex network of thin, light gray lines resembling a circuit board or data flow diagram. Scattered throughout are several hexagons of various sizes and colors, including red, blue, green, yellow, purple, and black. Some hexagons are solid, while others are hollow with a white fill and a colored border. The overall aesthetic is clean, modern, and technological.

# BAB I

# Pendahuluan

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat bahan usulan kegiatan yang dibahas pada forum Perangkat Daerah (PD) dan pelaksanaan musrenbang Kabupaten Pinrang Tahun 2024. Hasil dari musrenbang tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2024.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) menyusun Renja OPD dengan mengacu pada rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), Renstra OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya serta masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan

fungsi setiap perangkat daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana kerja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman kepada rencana strategis (renstra) perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

#### **1.1.1. Pengertian Renja OPD**

Rencana kerja (Renja) OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

#### **1.1.2. Proses Penyusunan Renja OPD**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang merupakan Dokumen Perencanaan secara menyeluruh yang dibuat setiap tahunnya dengan data yang didapatkan dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten yang mengacu kepada Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah (Renstra OPD) sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

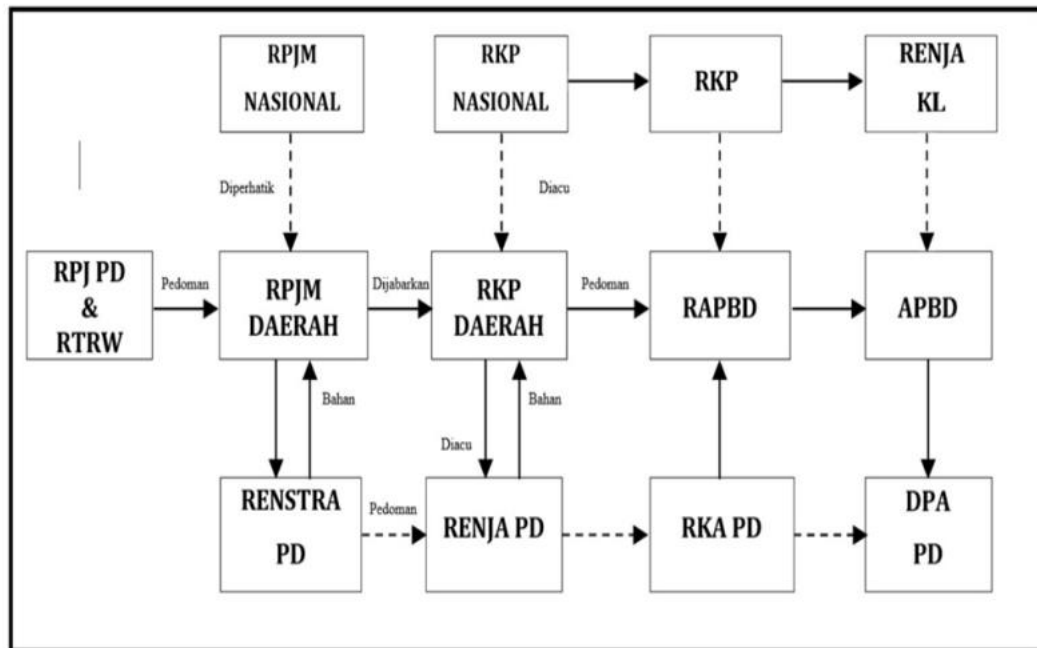
#### **1.1.3. Keterkaitan antara Renja OPD dengan Renstra OPD dan RKPD Kab. Pinrang 2024**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang merupakan Dokumen Perencanaan secara menyeluruh yang dibuat setiap tahunnya dengan data yang didapatkan dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten yang mengacu kepada Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah (Renstra OPD) sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam rangka penyusunan renja perangkat daerah, perangkat daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPELITBANGDA dan pemangku kepentingan. Renja perangkat daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan Rancangan Awal;
- c. penyusunan Rancangan;
- d. pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Keterkaitan antara Rencana Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pinrang dengan RKPD, Rencana Strategis dan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Keterkaitan Renja, Renstra dan Dokumen Lainnya

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pinrang beraskan Pancasila dan UUD 1945 serta landasan hukum bersifat operasional yang mendukung arah kebijakan Rencana Strategis Dinas, meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 442);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Negara RI Nomor 4437 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 19* (Covid – 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang SPM;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023;
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 486);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;



20. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 -2024;
21. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 52 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang;
22. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050 / 2020 / SJ, tanggal 11 Agustus 2005, perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

Mengacu pada hal diatas maka beberapa komponen yang dianggap mendukung adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dibidangnya.
2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung.
3. Pendanaan baik yang bersumber dari APBD II, APBD I dan APBN.

Penyusunan program berdasarkan RENSTRA Dinas dengan pertimbangan kemampuan keuangan dan tingkat kebutuhan yang ada di Kabupaten Pinrang dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **a. Maksud**

Penyusunan Renja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan kerja Disbimacipta Tahun 2024 yang mendukung atau mewujudkan visi misi Bupati Tahun 2019-2024 juga menjadi masukan utama dan mendasar bagi perencanaan diperingkat yang lebih atas seperti Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Renstra OPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bahkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

b. Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang 2024 bertujuan merumuskan gambaran kinerja Disbimacipta yang akan dicapai selama periode 1 (satu) tahun beserta yang lebih konkrit mengenai daftar program, kegiatan dan pagu indikatif Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang serta sumber pendanaannya sesuai dengan PERMENDAGRI No. 13/2006.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

### 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

BAB V PENUTUP



## BAB II

# Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah



## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) suatu OPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis OPD yang akan dilaksanakan. Dalam dokumen Rencana Kerja, tertuang tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran / hasil dari kegiatan / program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan / program dan kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas.

Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Dalam konsep ini diperlukan indikator *Input* (masukan) *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil). Secara rinci indikator-indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Indikator Masukan (*Input*), yaitu indikator yang menggambarkan segala sesuatu yang dibutuhkan, baik berupa sumber dana, sumber daya alam, sumber daya manusia maupun berupa teknologi dan informasi, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. Indikator keluaran (*Output*), yaitu indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.

3. Indikator hasil (*Outcome*), yaitu indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

Suatu kegiatan dinilai ekonomis bila sumber daya alam yang digunakan sebaik-baiknya sebagai input kegiatan. Penggunaan input sebaiknya untuk mendapatkan output secara maksimal dinamakan efisien dan seberapa besar output akan menghasilkan outcome dinamakan efektif. Penilaian seberapa besar nilai ekonomis dan nilai efisien suatu kegiatan dapat dilihat secara langsung atau jangka pendek, karena output merupakan hasil langsung dari suatu kegiatan. Namun sulit untuk menilai seberapa efektif suatu kegiatan karena efektifitas baru dapat dinilai pada jangka menengah yang membutuhkan beberapa tahun penelitian/penilaian. Tabel 2.1 menyajikan review hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang Tahun 2022, dan realisasi Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan atau realisasi APBD, sebagai berikut :

Tabel T-C.29  
 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2022  
 Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pinrang

No	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) _tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan (2023)			Ket
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023 (TW I)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	99,88	96,41	99,75	96,41	96,65	99,78	0	96,53	

	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi	100	80	100	100	100	100	0	80	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu	15	12	3	3	100	2	0	80	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana anggaran yang berkualitas dan tepat waktu	5	4	1	1	100	1	0	80	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana perubahan anggaran yang berkualitas dan tepat waktu	5	4	1	1	100	1	0	80	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen anggaran yang berkualitas dan tepat waktu	5	4	1	1	100	1	0	80	



	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan anggaran yang berkualitas dan tepat waktu	5	4	1	1	100	1	0	80
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang berkualitas dan tepat waktu	85	68	17	17	100	17	0	80
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas dan tepat waktu	8	6	2	2	100	2	0	75
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase serapan anggaran secara tepat waktu dan sesuai aturan	99	96,73	98	96,73	100	98	0	97,71
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang tersusun tepat waktu	364	217	73	73	100	69	0	59,62

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN yang terbayarkan secara akurat	25	15	5	5	100	5	0	60
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun tepat waktu	25	20	5	5	100	5	0	80
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun tepat waktu	5	3	1	1	100	1	0	60
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang berkualitas sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan	85	51	17	17	100	17	0	60

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tercatat dalam daftar pengguna barang sesuai analisa jumlah kebutuhan	100	100	100	100	100	100	0	100	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan RKBU yang tersusun sesuai aturan	10	6	2	2	100	2	0	60	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penyusunan barang dan aset yang tersusun sesuai aturan	10	6	2	2	100	2	0	60	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai aturan	100	75	100	100	100	100	0	75	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian lapangan dan atribut pelengkap yang sesuai peruntukan	364	144	0	0	0	100	0	39,56	

	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengelolaan administrasi kepegawaian yang tersusun secara akurat	60	36	12	12	100	12	0	60
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	173	80	36	36	100	30	0	46,24
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum sesuai rencana kebutuhan	100	75	100	100	100	100	0	75
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan pelaksanaan pemenuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	12	6	2	2	100	2	0	50

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan pelaksanaan pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan	12	6	2	2	100	2	0	50
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah laporan pelaksanaan pemenuhan barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan	24	12	4	0	0	4	0	50
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah laporan pelaksanaan pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan sesuai analisa kebutuhan	99	59	20	23	115	20	0	59,60
	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah laporan pelaksanaan pemenuhan bahan / material sesuai kebutuhan	20	12	4	4	100	4	0	60

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi sesuai kebutuhan	498	338	94	94	100	94	0	67,87
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem informasi berbasis web dalam pemenuhan kepuasan masyarakat	7	4	0	0	0	1	0	57,14
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100	80	100	80	80	100	0	80
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	6	1	1	0	0,00	1	0	16,67
	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	82	51	16	17	106,25	16	0	62,20

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	142	74	38	38	100	3	0	78,87
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah prasarana dan sarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	10	12	8	8	100	0	0	120
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai rencana kebutuhan	100	75	100	100	100	100	0	75
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terdistribusi dengan baik	5124	2756	1056	1056	100	1056	0	74,40
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi dan listrik sesuai kebutuhan	35	18	4	4	100	4	0	62,86

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan jasa pelayanan umum kantor sesuai analisa kebutuhan	160	96	12	12	100	32	0	67,5	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai rencana kebutuhan	100	100	100	100	100	100	0	100	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemenuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional	32	26	27	27	100	27	100	84,38	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	610	366	122	122	100	122	0	80	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/t erehabilitasi	4	4	4	4	100	4	0	100	



	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/terehabilitasi dalam kondisi baik	20	12	4	4	100	4	0	80
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten	100	93,47	100	95	95	100	-	95
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	100	97,68	100		0	100	0	97,68

		Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	100	95,41	100	95,41	95,41	100	0	95,41	
	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain	1	1	1	1	100	0	0	100	
		Jumlah Desa yang mendapatkan pendampingan pembentukan SPAM Pedesaan	59	16	17	1	5,88	17	0	27,12	
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit distribusi yang dibangun	59	8	4	1	25	17	0	15,25	
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang dibangun	8327	559	1245	799	64,18	1743	0	21,66	

	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase TPA Regional yang di Bangun sesuai Kriteria Pengelolaan Persampahan Regional	76	43	0	0	0	0	-	56,58	
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Luas Lahan TPA Regional sesuai kriteria pengelolaan persampahan regional	10,56	7,57	0	0	0,00	0	0	71,69	
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Luas TPA Regional yang dibangun direhabilitasi	11	2	0	0	0,00	0	0	18,18	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	99,99	97,56	98,19		0	99,81	-	99,69	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rumah tinggal bersanitasi	99,99	97,56	98,19		0	100	0	97,57	
		Pesentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	86,91	86,79	88,45	82,22	100	100	0	82,22	

		Persentase rumah tangga yang tersambung dengan SPALD-T	108	104	104	104	100	104	104	100	
		Persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	12	12	12	12	12	12	12	100	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen perencanaan teknis terinci SPALD-T dan IPLT	4	1	0	0	0	1	0	25	
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	800	300	350	319	91,14	500	0	39,88	

	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	800	619	500	166	33,20	100	0	98,13
	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	7520	6413	5520	1538	27,86	5520	0	85,28
	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	100	0	100	100	100	100	0	100
	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	100	0	100	100	100	100	0	100
	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	100	0	100	100	100	100	0	100

	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	91	86	86	86	100	88	0	94,51
		Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	945	657	500	166	33,20	0	0	87,09
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	100	0	100	100	100	100	0	100
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja (Rumah)	7520	6413	5520	1538	27,86	5520	0	85,28
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja (Rumah)	7520	3520	5520	1538	27,86	5520	0	46,81

		Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	100	75	100	75	75,00	100	0	75
		Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	100	75	75	75	100	75	0	75
		Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	100	0	100	100	100	100	0	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	3,4	2,3	3,2	78,59	2455,94	3,2	-	67,65
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah	Daerah yang Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	100	44,31%	62,65%		0	80,98	0	25,97
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen teknis sistem drainase perkotaan	4	1	0	0	0	1	0	25
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Drainase yang terbangun	264,07	88,77	53,45	2,45	91,67	55,2	0	34,54

	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang drainase yang terpelihara dengan baik	263,69	110,59	151	83,59	55,36	151,81	0	73,64
	Program Pengembangan Permukiman	Rasio infrastruktur permukiman di kawasan strategis daerah	0,073	0,05	0,05	0,05	100	0,06	-	68,49
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase permukiman di kawasan strategis daerah yang telah tertata	80	...	60	...	...	70	-	100
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen teknis infastruktur permukiman di kawasan strategis daerah	5	3	0	0	0	1	0	60
		Jumlah permukiman di Kawasan strategis daerah yang dibangun	3	2	1	1	100	0	0	66,67
	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota	100	100	100	100	100	100	-	100



	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota , Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	0,077	0,068	0,07		0	0,073	0	88,31	
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	0,0011	0,00185	0,00056	0,00185	3,30	0,00056	0	168,18	
		Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	1225	333	250	1010	404	250	0	109,63	
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rasio penataan bangunan dan lingkungannya di daerah	0,0189	0,005	0,0196	0,0196	100	0,0192	0	26,46	
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase bangunan dan lingkungannya yang tertata di Daerah	100	24,87	61,76	61,76	100	80,7	0	24,87	

	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan (Dokumen)	5	2	1	1	100	1	0	40
	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan gedung yang dibangun	51	0	0	0	0	0	0	0,00
		Jumlah Penerangan jalan umum yang terpasang	3307	1180	167	167	100	0	0	40,73
	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan dan lingkungannya yang dipelihara (Gedung)	636	585	0	0	100,00	0	0	91,98
		Jumlah penerangan jalan umum yang dipelihara	3307	1376	158	154	90,17	444	0	46
	Program Penyelenggaraan Jalan	Kualifikasi Jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang	100	69,53%	82,77%	69,53%	84,00	98,26%	-	69,53%
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	96,5	69,53%	76,14	69,53	91,32	94,20	0	61,19

		Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	0	0,9%	0	0,9%	#DIV/0!	0	0,009	100	
		Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	96,5	69,53%	76,14	69,53	91,32	94,20	0	61,19	
	Pengelolaan Leger Jalan	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	59,64%	12,77%	46,22%	12,77%	0	52,83%	0	21,41	
		Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	0,52%	0,66%	0,64%	0,66%	103,13	0,58%	-	126,92	
		Jumlah dokumen teknis leger jalan	4	2	1	1	100	1	0	50	
	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun (Km)	299,8	55,92	85,62	8,63	10,08	85,63	0	18,65	
	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi (Km)	240,722	35,205	70	7,2	10,29	70	0	38,20	

	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dipelihara (Km)	64,233	7,098	25	4,12	16,48	25	0	13,51	
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi) (Km)	152,59	22,15	73,91	11,156	15,09	35,39	0	21,83	
	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun (Km)	3,98	1,169	0,7	0	0,00	0,7	0	29,37	
	Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0,114	0,0415	0,2	0,02	10,00	0,4	0	17,59	
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya	100	100	100	100	100	100	0	100	
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase kebijakan penataan ruang yang diterbitkan sesuai aturan	100	60	60	60	100	60	0	60	
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen teknis RRTR atau sejenisnya (Dokumen)	5	3	1	1	100	1	0	60	

	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah rekomendasi TKPRD yang dikeluarkan (Rekomendasi)	18	8	4	4	100	4	0	66,67
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan penataan ruang (Pekerjaan)	12	6	3	3	100	3	0	75
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen tata guna lahan sesuai RTRW yang disusun	100	8	54	100	185,2	54	0	31
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Guna Lahan sesuai RTRW	13	4	3	1	33,33	3	0	38,46
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara	0,2045	0,191	0,2622	0,191	72,85	0,243	0	93,40
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan identifikasi pemanfaatan ruang (Laporan)	48	15	12	12	100	12	0	31,25

	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah laporan sistem informasi penataan ruang	4	2	1	1	100	1	0	50	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Ruang publik yang berubah peruntukannya	0	0	0	0	100	0	0	100	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah penertiban dan penegakan hukum pelanggaran bidang penataan ruang (Kasus)	16	12	4	4	100	4	0	75	
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah ruang publik yang berubah fungsi (Ha)	0	0	0	0	100	0	0	100	

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan data-data yang ada, indikator kinerja keluaran (*output performance*) dari Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang mengalami kenaikan pada beberapa indikator hal ini terlihat dari capaian Program dan Kegiatan pada tahun 2022, bahwa Pelaksanaan Kegiatan yang ada di DPA dapat direalisasikan dengan baik oleh Pelaksana Kegiatan di Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang. Berdasarkan hasil tersebut Evaluasi Kinerja dari kegiatan, bahwa Pelaksana Kegiatan telah berusaha maksimal dan berhasil dalam upaya merealisasikan target kinerja yang telah disepakati dalam DPA kegiatan di awal tahun. Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas dapat dilihat pada Tabel 2.2.

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022  
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN PINRANG**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target TPB/SDGs - SPM	Target Renstra (Dinas BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG) Tahun						Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>														
1	Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah	-	-	Nilai 72,61 (BB)	Nilai 72,03 (BB)	Nilai 78,00 (BB)	Nilai 79,00 (BB)	Nilai 82,00 (BB)	Nilai 84,00 (BB)	Nilai 79,05 (BB)	...	Nilai 82,00 (A)	Nilai 84,00 (A)	
2	Nilai Survei kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah	-	-	88,25 (Sangat Baik)	88,67 (Sangat Baik)	89,50 (Sangat Baik)	90,00 (Sangat Baik)	90,50 (Sangat Baik)	91,00 (Sangat Baik)	86,50 (Sangat Baik)	86,76	90,50 (Sangat Baik)	91,00 (Sangat Baik)	
3	Kualifikasi panjang jalan Kabupaten yang baik dan sedang	-	-	56,51 %	65,73 %	71,73 %	82,77 %	98,26 %	100%	61,35 %	69,52 %	98,26 %	100%	
4	Tingkat kemantapan jalan Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang	-	-	13,85 %	52,89 %	61,31 %	69,74 %	78,16 %	100%	53,22 %	63,32 %	78,16 %	100%	



5	Presentase jumlah RT yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi	-	-	77%	93,49 %	100%	100%	100%	100%	95,05 %	95,31 %	100%	100%	
6	Ketaatan terhadap RTRW	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI - OUTCOME (Permendagri 18 Tahun 2020)</b>														
1	Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh kabupaten/kota	100%	-	77%	93,49%	100%	100%	100%	100%	95,05%	95,31 %	100%	100%	
2	Presentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	-	96,9%	97,56%	98,19%	98,81%	99,42%	99,99%	97,78%	98,31 %	99,42%	99,99%	
3	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten/ kota	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

4	Tingkat Kemantapan jalan Kabupaten/Kota	100%	-	56,51 %	65,73%	71,73%	82,77%	98,26%	100%	61,35%	69,52 %	98,26%	100%	
<b>INDIKATOR KINERJA SPM (PP Nomor 2 Tahun 2018)</b>														
1	Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh kabupaten/kota	-	100%	77%	93,49%	100%	100%	100%	100%	95,05%	95,31 %	100%	100%	
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	-	100%	96,9%	97,56%	98,19%	98,81%	99,42%	99,99%	97,78%		99,42%	99,99%	
<b>INDIKATOR KINERJA TPB/SDGs (Perpres Nomor 59 Tahun 2017)</b>														
1	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	-	100%	77%	93,49%	100%	100%	100%	100%	95,05%	95,31 %	100%	100%	belum
2	Presentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	-	86,91%	89,49%	88,79%	88,45%	87,94%	87,42%	86,91%	97,6%	98,31 %	87,42%	86,91%	belum

3	Presentase rumah tangga yang tersambung dengan SPALD-T	-	0,52%	0,05%	0,15%	0,25%	0,34%	0,44%	0,52%	0,53%		0,44%	0,52%	
4	Pretentase rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	-	7,18%	2,57%	3,54%	4,48%	5,41%	6,30%	7,18%	2,79%		6,30%	7,18%	
<b>INDIKATOR KINERJA LAINNYA (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)</b>														
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-	-	34,92%	40,03%	58,09%	76,14%	94,20%	96,50%	45,33%	69,53%	94,20%	96,50%	
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	-	-	0,00216	0,00213	0,00211	0,00208	0,00205	0,00203	0,0021		0,00205	0,00203	
3	Presentase kawasan permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	-	-	5,56%	3,70%	1,85%	0%	0%	0%	3,70%	0%	0%	0%	
4	Presentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/ Jam)	-	-	34,92%	40,03%	58,09%	76,14%	94,20%	96,50%	45,33%		94,20%	96,50%	

5	Presentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	-	-	26%	33,61%	39,82%	46,22%	52,83%	59,64%	33,61%		52,83%	59,64%	
6	Presentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan liar	-	-	0,81%	0,75%	0,70%	0,64%	0,58%	0,52%	0,75%		0,58%	0,52%	
7	Presentase rumah tinggal bersanitasi	-	-	96,9%	97,56%	98,19%	98,81%	99,42%	99,99%	97,78%		99,42%	99,99%	
8	Presentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	-	-	2,24%	2,31%	3,1%	3,2%	3,3%	3,4%	%		3,3%	3,4%	
9	Daerah tidak terjadi genangan >2 kali setahun	-	-	24,15%	25,97%	44,31%	62,65%	89,89%	100%	%		89,89%	100%	
10	Presentase penduduk berakses air minum	-	-	81%	97,68%	100%	100%	100%	100%	95,05%		100%	100%	
11	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	-	-	81%	97,68%	100%	100%	100%	100%	95,05%		100%	100%	
12	Rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan	-	-	0,066	0,068	0,070	0,073	0,075	0,077	0,003		0,075	0,077	belum
13	Ruang Publik yang berubah peruntukannya	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	ok

14	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	-	-	0,3274	0,2928	0,2622	0,2430	0,2305	0,2045	%	0,190 1	0,2305	0,2045	
----	--	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---	------------	--------	--------	--

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi daerah dan analisis permasalahan pembangunan yang musti menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan pembangunan dalam lima tahun mendatang yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019 – 2024. Hal yang menjadi prioritas dalam hal pengembangan infrastruktur adalah :

1. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik; dan
2. Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur antar wilayah terutama pada wilayah pegunungan.

Selanjutnya rumusan permasalahan tersebut dijabarkan dalam bentuk akar masalah, seperti pada Tabel 2.3

**Tabel 2.3.1 Rumusan Permasalahan Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur antar wilayah terutama pada Wilayah pegunungan**

Permasalahan	Akar Masalah
Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan pada wilayah pegunungan Masih Kurang	Wilayah Pegunungan
	Kondisi Jalan Rusak masih tinggi terutama untuk wilayah pegunungan
	Minimnya Sarana Prasarana Perhubungan
Belum Meratanya Ketersediaan Sarana Prasarana Publik	Sarana Prasarana dan Sumber daya kurang tersedia
	Kurangnya Pemahaman masyarakat mengenai sanitasi
	Jaringan Irigasi untuk sumber air baku kurang mencukupi

Sumber : RPJMD Kabupaten Pinrang 2019 - 2024

**Tabel 2.3.2**  
**Pemetaan Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi**  
**Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Belum terwujudnya pemerintahan yang melayani dan akuntabel	Perencanaan dan penganggaran belum efektif dan efisien
			Belum tersedianya perangkat yang dapat mengukur dan mengendalikan program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan daerah
			Masih berlakunya prosedur birokrasi pada pelayanan publik
			Masih kurangnya kesadaran dan kedisiplinan aparatur pemerintahan sebagai pelayan masyarakat
2	Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur antar wilayah terutama pada Wilayah Pinrang Bagian Utara	Kualitas infrastruktur jalan dan perhubungan pada wilayah pegunungan masih kurang	Wilayah pegunungan
			Kondisi jalan rusak masih tinggi terutama untuk wilayah pegunungan
			Minimnya sarana prasarana perhubungan
		Belum Meratanya Ketersediaan Sarana Prasarana Publik	Sarana Prasarana dan Sumber daya kurang tersedia
			Kurangnya Pemahaman masyarakat mengenai sanitasi
			Sumber air baku untuk air bersih dan irigasi kurang mencukupi
			Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai fungsi
Alih fungsi lahan			

*Sumber : RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024*

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang dengan visi dan misi Bupati terkait program prioritas

program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang dapat dilihat Tabel 2.4.



**Tabel 2.4**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023**

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
I	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kab.Pinrang	Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh kabupaten/kota	100%	8.687.729.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh kabupaten/kota			
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak,	100%	8.687.729.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak,			

	(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		perkotaan dan perdesaan			(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		perkotaan dan perdesaan		
			Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	100%				Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	100%	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Pinrang	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1	2.234.878.700	Penyusunan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Pinrang	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun (Dokumen)	2	
	Supervisi Pembangunan / Peningkatan/ Perluasan/ perluasan SPAM		Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan SPAM	-	200.000.000	Supervisi Pembangunan / Peningkatan/ Perluasan/ perluasan SPAM		Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan SPAM (Dokumen)		

Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang Terbangun (liter/detik)	0,6 liter/detik	732.007.400	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang Terbangun (liter/detik)			
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat (SR)	-	732.007.400	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat (SR)			
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu		6.043.379.100	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu			
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Jumlah sambungan rumah yang dibangun (Rumah)		200.000.000	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Jumlah sambungan rumah yang dibangun (SR)	-		

	Perluasan SPAM Jaringan Perpipa-an di Kawasan Perkotaan		Jumlah Penambahan SR yang Terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan Penambahan Jaringan Perpipa-an pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	45 SR	200.000.000	Perluasan SPAM Jaringan Perpipa-an di Kawasan Perkotaan		Jumlah Penambahan SR yang Terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan Penambahan Jaringan Perpipa-an pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu			
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		Persentase TPA regional yang dibangun sesuai kriteria pengelolaan persampahan regional	75%	1.893.907.150	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		Persentase TPA regional yang dibangun sesuai kriteria pengelolaan persampahan regional	74%	648.236.682	
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		Luas lahan TPA regional sesuai kriteria pengelolaan persampahan regional (Ha)	931	1.893.907.150	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		Luas lahan TPA regional sesuai kriteria pengelolaan persampahan regional (Ha)	8,07	648.236.682	

	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/ TPS/ SPA/ TPS-3R/ TPS		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/ TPS/ SPA/ TPS-3R/ TPS	1	363.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/ TPS/ SPA/ TPS-3R/ TPS		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/ TPS/ SPA/ TPS-3R/ TPS	1	69.355.000	
	Pembangunan TPA/ TPS/ SPA/ TPS-3R/ TPS		Luas TPA Regional yang dibangun /Direhabilitasi (Ha)	11	129.915.590	Pembangunan TPA/ TPS/ SPA/ TPS-3R/ TPS		Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS (RT)	11	578.881.682	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	99,42%	663.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	98,81%	6.267.250.007	

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tinggal bersanitasi	98,81%	663.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tinggal bersanitasi			
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	87,94%			Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak			
	Persentase rumah tangga yang tersambung dengan SPALD-T	0,34%			Persentase rumah tangga yang tersambung dengan SPALD-T			
	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	5,41%			Persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja			

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Paleteang	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	363.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Paleteang	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan SPALDT Skala Kota	-	Jumlah dokumen Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan SPALDT Skala Kota	1	100.000.000	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan SPALDT Skala Kota	-	Jumlah dokumen Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan SPALDT Skala Kota			
Pembangunan/Penyediaan SPALT Skala Kota		Jumlah RT yang tersambung dengan SPALD T Skala Kota	450	200.000.000	Pembangunan/Penyediaan SPALT Skala Kota		Jumlah RT yang tersambung dengan SPALD T Skala Kota			

IV	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kab. Pinrang (Perkotaan)	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran tidak tersumbat	3,3%	3.241.548.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kab. Pinrang (Perkotaan)	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran tidak tersumbat			
	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung	Kab. Pinrang (Perkotaan)	Persentase daerah yang tidak terjadi genangan >2 kali setahun	80,98%	3.241.548.000	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung	Kab. Pinrang (Perkotaan)	Panjang drainase yang berfungsi dengan baik (terhubung dengan sungai)			
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Kec. Paleteang	Jumlah dokumen teknis sistem	1 Dokumen	363.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Kec. Paleteang	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan			
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Kab. Pinrang (Perkotaan)	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	58,7 m	363.000.000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Kab. Pinrang	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun			



	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Kab. Pinrang (Perkotaan)	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	207 km	2.515.548.000	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Kab. Pinrang (Perkotaan)	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi			
V	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Kab. Pinrang	Rasio infrastruktur permukiman di kawasan strategis daerah	0,064 Rasio	624.771.350	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		Rasio infrastruktur permukiman di kawasan strategis daerah			
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	Persentase permukiman di kawasan strategis daerah yang telah tertata	70%	624.771.350	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	Persentase permukiman di kawasan strategis daerah yang telah tertata			
	Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	Kab. Pinrang	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 SJ	624.771.350	Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	Kab. Pinrang	Jumlah SJ Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (SJ)			

VI	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Kab. Pinrang	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten/ Kota	100%	253.065.000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Kab. Pinrang	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten/ Kota			
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah kabupaten/Kota, Pemberiaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kab. Pinrang	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	0,077 Rasio	253.065.000	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah kabupaten/Kota, Pemberiaan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan			

Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kec. Paleteang	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	0,00101 Rasio	153.065.000	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kab. Pinrang	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG (Dokumen)			
Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	Jumlah regulasi terkait bangunan gedung yang diterbitkan	1	50.000.000	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan gedung Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	Jumlah regulasi terkait bangunan gedung yang diterbitkan (Peraturan)	0		0

	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan bangunan gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bangunan gedung Negara daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1 dokumen	50.000.000	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bangunan gedung Negara daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)			
VI	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Kab. Pinrang	Rasio penataan bangunan dan lingkungannya di daerah	0,0189	5.338.233.560	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		Rasio penataan bangunan dan lingkungannya di daerah			
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	Persentase bangunan dan lingkungannya yang tertata di Daerah	100%	5.338.233.560	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase bangunan dan lingkungannya yang tertata di Daerah			

Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungann di Kabupaten/Kota	Kec. Paleteang	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	130.831.120	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungann di Kabupaten/Kota	Kec. Paleteang	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota			
Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Kab. Pinrang	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis lainnya (Kawasan)	1 kawasan	3.720.198.240	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Kab. Pinrang	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis lainnya (Kawasan)			

	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungannya		Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis lainnya (Kawasan)	2 kawasan	1.487.204.200	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungannya	Kab. Pinrang	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis lainnya (Kawasan)			
VI II	PROGRAM PENYELENGGA RAAN JALAN	Kab. Pinrang	Kualifikasi Jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang	96,50%	66.230.467.400	PROGRAM PENYELENGGA RAAN JALAN		Kualifikasi Jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang			
	Penyelenggaraan Jalan Kabupate/Kot a	Kab. Pinrang	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	96,50%	66.230.467.400	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Ko ta		Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik			
			Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan	0%				Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan			

			roda 4					roda 4			
			Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam)	96,50%				Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam)			
	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan	Kec. Paleteang	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	1 dokumen	363.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan	Kec. Paleteang	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian			
	Pengelolaan Leger Jalan		Jumlah dokumen pengelolaan leger jalan	1 dokumen	77.198.000	Pengelolaan Leger Jalan	Kec. Paleteang	Jumlah dokumen pengelolaan leger jalan (Dokumen)			
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kab. Pinrang	Jumlah Data dan Informasi terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 data	121.000.000	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kab. Pinrang	Jumlah Data dan Informasi terkait Kondisi Jalan/Jembatan (Dokumen)			

	Pembangunan Jalan	Kab. Pinrang	Panjang jalan yang dibangun	15 km	30.000.000.000	Pembangunan Jalan	Kab. Pinrang	Panjang jalan yang dibangun (Km)			
	Rekonstruksi Jalan	Kab. Pinrang	Panjang jalan yang dilakukan rekonstruksi jalan (km)	20 km	15.000.000.000	Rekonstruksi Jalan	Kab. Pinrang	Panjang jalan yang dilakukan rekonstruksi jalan (km)			
	Rehabilitasi Jalan	Kab. Pinrang	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	4,82 km	50.000.000	Rehabilitasi Jalan	Kab. Pinrang	Panjang jalan yang direhabilitasi (Km)			
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kab. Pinrang	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	0,84 m	30.000.000	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kab. Pinrang	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala (km)			
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Pinrang	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	35,39 km	857.000.000	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Pinrang	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin (km)	35,39	1.798.620.229	



	Pembangunan Jembatan	Kab. Pinrang	Panjang jembatan yang dibangun	83 m	18.684.944.000	Pembangunan Jembatan	Kab. Pinrang	Panjang jembatan yang dibangun (M)			
	Rehabilitasi Jembatan	Kab. Pinrang	Panjang jembatan yang dilakukan rehabilitasi	30 m	1.204.325.400	Rehabilitasi Jembatan	Kab. Pinrang	Panjang jembatan yang dilakukan rehabilitasi (M)			
	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Kab. Pinrang	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	100 m	500.000.000	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Kab. Pinrang	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala			
X	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kab. Pinrang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya	100%	1.287.981.100	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		Persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya			
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	Persentase kebijakan penataan ruang yang diterbitkan sesuai aturan	100%	1.287.981.100	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Persentase kebijakan penataan ruang yang diterbitkan sesuai aturan			

Pelaksanaan Persetujuan substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR kabupaten /Kota	Kab. Pinrang	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	601.329.800	Pelaksanaan Persetujuan substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR kabupaten /Kota		Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota			
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan ruang	Kab.	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Rekomendasi)	1 Dokumen	66.050.800	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan ruang	Kec. Paleteang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (dokumen)			
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Kab. Pinrang	Jumlah dokumen sosialisasi kebijakan bidang penataan ruang	3	55.023.500	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	3 lokasi	Jumlah dokumen sosialisasi kebijakan bidang penataan ruang (Dokumen)			

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Pinrang	Persentase dokumen tata guna lahan sesuai RTRW yang disusun	100%	399.300.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase dokumen tata guna lahan sesuai RTRW yang disusun			
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1	399.300.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Pinrang	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	0.2430	48.670.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota		Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan			

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kab. Pinrang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	18.150.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kab. Pinrang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah			
Sistem Informasi Penataan Ruang	Kab. Pinrang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang (Dokumen)	1 Dokumen	30.520.000	Sistem Informasi Penataan Ruang	Kec. Paleteang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang (Dokumen)			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	Ruang publik yang berubah peruntukannya	0%	117.607.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Ruang publik yang berubah peruntukannya			

	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kab. Pinrang	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hokum bidang Penataan Ruang	1	93.170.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kab. Pinrang	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hokum bidang Penataan Ruang	1		
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Pinrang	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang (Dokumen)	1	24.437.000	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Pinrang	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang (Dokumen)	1		
XI	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Paleteang	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	82,06%	15.766.639.326	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Paleteang	Persentase laporan dan dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu	100%	235.190.087	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase laporan dan dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu			

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Paleteang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	3 dokumen	65.297.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Paleteang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Paleteang	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	1 dokumen	7.229.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Paleteang	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Paleteang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)	1 dokumen	8.075.100	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Paleteang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)			

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Paleteang	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dokumen)	1 dokumen	8.075.100	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Paleteang	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dokumen)			
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Paleteang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) dan Laporan	1 dokumen	14.108.600	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Paleteang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) dan Laporan			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Paleteang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	17	14.108.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Paleteang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan			

			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	2	132.403.887		Kec. Paleteang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Paleteang	Persentase terpenuhinya laporan administrasi keuangan sesuai target dan berkualitas	98%	7.790.357.288	Administrasi Keuangan Perangkat	Kec. Paleteang	Persentase serapan anggaran secara tepat waktu sesuai aturan	98%	6.863.653.663	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Paleteang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	69 Orang/bul	6.776.323.443	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Paleteang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)			



	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Paleteang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	3 Dokumen	151.544.030	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Paleteang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)			
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Kec. Paleteang	Jumlah laporan pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD yang tersusun tepat waktu	12 Dokumen	811.046.907	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Kec. Paleteang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Paleteang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	16.480.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Paleteang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)			

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kec. Paleteang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	17 Laporan	34.962.708	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kec. Paleteang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Paleteang	Persentase laporan barang milik daerah yang tercatat dalam daftar pengguna barang sesuai analisa jumlah kebutuhan	100%	8.481.050	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Paleteang	Persentase laporan barang milik daerah yang tercatat dalam daftar pengguna barang sesuai analisa jumlah kebutuhan			
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Paleteang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	2 dokumen	2.554.100	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Paleteang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)			

	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Paleteang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	2 Laporan	5.926.950	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Paleteang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Paleteang	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai aturan	100%	295.490.900	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Paleteang	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai aturan			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Kec. Paleteang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)	2 paket	71.386.500	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Kec. Paleteang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)			
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Paleteang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	5 dokumen	24.104.400	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Paleteang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)			

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pinrang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	43 orang	200.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pinrang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Paleteang	Persentase sumber daya aparatur yang mencapai nilai SKP baik	100%	541.174.819	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Paleteang	Persentase sumber daya aparatur yang mencapai nilai SKP baik			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Paleteang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	2	19.798.600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Paleteang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)			

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Paleteang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	2	7.057.325	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Paleteang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Paleteang	Jumlah laporan pelaksanaan pemenuhan barang cetakan dan pengadaan sesuai kebutuhan	4	13.673.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Paleteang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	Jumlah laporan pelaksanaan pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan sesuai analisa kebutuhan	-	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Paleteang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)			

Penyediaan Bahan/ Material	Kec. Paleteang	Jumlah laporan pelaksanaan pemenuhan bahan / material sesuai kebutuhan	6 Laporan	18.159.783	Penyediaan Bahan/ Material	Kec. Paleteang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Paleteang	Jumlah laporan pelaksanaan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi sesuai kebutuhan	94 Laporan	305.631.480	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Paleteang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)			
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. Paleteang	Jumlah sistem informasi berbasis web dalam pemenuhan kepuasan Masyarakat	1 SI	110.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. Paleteang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen)			

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Paleteang	Persentase pemenuhan laporan pengadaan BMD sesuai rencana kebutuhan	100%	6.868.837.786	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Paleteang	Presentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi			
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Paleteang	Jumlah laporan kendaraan dinas/ operasional yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	1 laporan	88.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Paleteang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)			
Pengadaan Mebel	Kec. Paleteang	Jumlah laporan penyediaan meubeler yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	16 unit	55.000.000	Pengadaan Mebel	Kec. Paleteang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (unit)			

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Paleteang	Jumlah laporan peralatan dan mesin lainnya yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	4 laporan	272.850.005	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Paleteang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Paleteang	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	2	559.255.439	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Paleteang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	448.714.200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Paleteang	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai rencana kebutuhan			



	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	15.972.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Paleteang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)			
	Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	166.562.200	Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik	Kec. Paleteang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	266.180.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Paleteang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)			

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Paleteang	Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	4.581.465.400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Paleteang	Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai rencana kebutuhan			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Paleteang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	12 Lap	2.234.878.700	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Paleteang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)			

	Peneliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Paleteang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2 lap.	39.355.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Paleteang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)			
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Paleteang	Jumlah laporan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor sesuai rencana	2 lap.	230.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Paleteang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)			
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Paleteang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (unit)	1 Lap.	72.353.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Paleteang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (unit)			

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sistem perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yang terintegrasi ke dalam suatu dokumen perencanaan. Kelima pendekatan ini meliputi pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*):

1. Pendekatan politik memandang bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah tidak terlepas dari kebijakan perencanaan pembangunan nasional.
2. Perencanaan pembangunan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
3. Perencanaan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan.
4. Pendekatan atas-bawah (*top-down*) merupakan perencanaan yang diawali dari Pemerintah Pusat yang ditujukan ke Pemerintah Daerah.
5. Pendekatan bawah-atas (*bottom-up*) merupakan perencanaan yang diawali dengan penyusunan perencanaan dari tingkat lapisan masyarakat bawah yang kemudian diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.

Dalam perencanaan pembangunan dengan pendekatan bawah atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*) yang dilaksanakan melalui musyawarah mulai dari desa, kecamatan, kabupaten / kota, provinsi, dan nasional sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan daerah. Dengan diterapkannya pendekatan ini, maka Prinsip-prinsip *good gover* dalam tata Pemerintahan Daerah akan dapat diwujudkan dan dilembagakan dengan mudah, tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Hubungan dan Komunikasi antara Birokrasi daerah dan Masyarakat akan mudah dijalin dengan sangat baik

Dalam proses tersebut didapatkan usulan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-sosiasi, perguruan tinggi,dll. Dari hasil tersebut, terdapat beberapa usulan program/kegiatan yang terkait dengan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai pelaksana penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan daerah, statistik serta penelitian dan pengembangan, pengendalian, monitoring dan evaluasi. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 disajikan data dalam Tabel 2.5

**Tabel 2.5.**  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU**  
**KEPENTINGAN TAHUN 2024**  
**DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN**  
**PINRANG**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
I	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	Kab. Pinrang	<b>Persentase jumlah RT yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan terlindungi terhadap RT di seluruh Kabupaten</b>	<b>100%</b>	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Proporsi RT dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan	100%	
	Penyusunan rencana, kebijakan strategis dan teknis SPAM		Jumlah rencana, kebijakan strategis dan teknis SPAM	1 dok	
	Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM		Jumlah konsultasi supervise Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan SPAM	3 Dokumen	
	Pembangunan SPAM di Kawasan jaringan perpipaan di kawasan perkotaan		Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	0,924 liter/detik	

	Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan		Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	1,26 liter/detik	
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		Jumlah penambahan SR yang terlayani melalui Pemanfaatan <i>Idle Capacity</i> dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	900 SR	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>		<b>Persentase TPA regional yang dibangun sesuai kriteria pengelolaan persampahan regional</b>	<b>75%</b>	
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		Luas lahan TPA Regional sesuai kriteria pengelolaan persampahan regional	9,31 Ha	
	Penyusunan rencana,kebijakan , strategi dan teknis system pengelolaan persampahan TPA/TPST/SPA/TPS -3R/TPS kewenangan kab./kota		Jumlah rencana,kebijakan , strategi dan teknis system pengelolaan persampahan TPA/TPST/SPA/TPS - 3R/TPS kewenangan kab./kota	1 dokumen	

	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		Jumlah RT yang terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	36953 RT	
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>		<b>Persentase jumlah RT yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik</b>	<b>99,42%</b>	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase rumah tinggal bersanitasi	99,42%	
			Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	87,42%	
			Persentase rumah tangga yang tersambung dengan SPALD-T	0,44%	
			Persentase rumah tangga yang terlayani system pengelolaan lumpur tinja	6,30%	
	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis system pengelolaan air limbah domestic dalam daerah kab./kota		Jumlah rencana, kebijakan, strategi dan teknis system pengelolaan air limbah domestic dalam daerah kab./kota	1 dok.	
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sitem Setempat		Jumlah RT yang memiliki tangki septik	470 RT	



	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah		Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	4 unit	
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman		Jumlah RT yang tersambung dengan SPALD T Skala Permukiman	245 RT	
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja		Jumlah RT yang terlayani penyedotan lumpur tinja	5520 rumah	
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>		<b>Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat</b>	<b>3,3%</b>	
	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Daerah yang tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	80,98%	
	Penyusunan rencana, kebijakan strategi dan teknis system drainase perkotaan		Jumlah rencana, kebijakan strategi dan teknis system drainase perkotaan (dokumen)	1 dok.	
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan		Panjang drainase yang terbangun	9073 m	
	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan		Panjang drainase yang terpelihara dengan baik	1300 m	
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>		<b>Rasio infrastruktur permukiman di kawasan strategis daerah</b>	<b>0,064</b>	

	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase permukiman di kawasan strategis daerah yang telah tertata	70%	
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota		Jumlah Sistem Jaringan prasarana dan sarana permukiman yang dibangun di kawasan strategis daerah Kabupaten/Kota	1 SJ	
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>		<b>Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota</b>	<b>100%</b>	
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	0,075	
	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG),Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG),Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	3 dok	
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>		<b>Rasio penataan bangunan dan lingkungannya di daerah</b>	<b>0,0192</b>	

	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase bangunan dan lingkungannya yang tertata di Daerah	80,70%	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	1 dok	
	Penataan Bangunan dan Lingkungan		Jumlah PBL di kawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata, kawasan system perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya	2 kawasan	
	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		Jumlah pemeliharaan BL di kawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata, kawasan system perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya	1 kawasan	
<b>VIII</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>		<b>Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang</b>	<b>98%</b>	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	94,20%	
			Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	0,00%	

			Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/Jam)	94,20	
	Penyusunan rencana,kebijakan,strategi dan teknis system pengembangan jalan		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan advis dari layanan teknis, kajian kebijakan, bantuan teknis, pengelolaan pengendalian	1 dok	
	Pengelolaan Leger Jalan		Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	1 dok	
	Pembangunan Jalan		Panjang jalan kabupaten yang terbangun	3,625 km	
	Rekonstruksi Jalan		Panjang jalan yang dilakukan rekonstruksi	11,066 km	
	Pemeliharaan Berkala Jalan		Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	3 km	
	Pemeliharaan Rutin Jalan		Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	7,7 km	
	Pembangunan Jembatan		Panjang jembatan yang dibangun	35 m	
	Rehabilitasi Jembatan		Panjang jembatan yang dilakukan rehabilitasi (m)	16	
<b>X</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>		<b>Persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya</b>	100%	

	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota		Persentase kebijakan penataan ruang yang diterbitkan sesuai peruntukannya	80%	
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 dok	
	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah dokumen kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 dok	
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang		Jumlah dokumen sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan	3 dok	
	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Persentase dokumen tata guna lahan sesuai RTRW yang disusun	77%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1 dok	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	0,2305	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 dokumen	
	Sistem Informasi Penataan Ruang		Jumlah data dan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi penataan ruang	1 dokumen	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Ruang publik yang berubah peruntukannya	0%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang		Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	1 dokumen	
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 dok	
<b>XI</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		<b>Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi</b>	<b>99,78%</b>	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase laporan dan dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu	100%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	1 dok	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 dok	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 lap	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 lap	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya laporan administrasi keuangan sesuai target dan berkualitas	98,20%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 orang/bulan	

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 lap	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	17 lap	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase barang milik daerah yang tercatat dalam daftar pengguna barang	100%	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dok	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 lap	



	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase sumber daya aparatur yang mencapai nilai SKP baik	100%	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan lainnya		Jumlah paket pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 paket	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dok	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 orang	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kebutuhan layanan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dok	

	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94 lap	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dok	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28 unit	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah laporan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	3 lap	

			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat terdistribusi secara efektif dan efisien	1056 surat	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik		Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lap	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau		Jumlah pemenuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional	12 lap	

	Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah laporan peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara sesuai kebutuhan	2 lap	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	122 unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 gedung	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	

The background of the page is a light gray color with a complex pattern of white lines and dots, resembling a circuit board or a network diagram. Overlaid on this are several hexagons of various colors (red, blue, green, yellow, purple, and gray) with a 3D effect, appearing to float above the circuit lines. The hexagons are arranged in a somewhat scattered pattern, with some overlapping others.

# BAB III

## Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

## TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arah kebijakan pembangunan wilayah pada RPJMN secara umum untuk menyelesaikan ketimpangan antar wilayah dengan sasaran yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DISBIMACIPTA yaitu **meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah** dengan merumuskan rencana program dan kegiatan sesuai prioritas pembangunan nasional.

Program-program strategis DISBIMACIPTA yang mendukung prioritas pembangunan nasional di tahun 2024 dalam hal upaya pencapaian target SDGs/TPB yaitu :

- (1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- (2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

Target-target SDGs/TPB menjadi prioritas pembangunan nasional telah sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. Sedangkan pencapaian target SDGs/TPB ditingkat Kabupaten/Kota telah dituangkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024. Dan untuk mencapai tujuan SDGs/TPB maka DISBIMACIPTA berkontribusi pada Tujuan 6 : **Menjamin Ketersediaan serta**

**Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk semua.**

### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang tahun 2019-2024 meliputi indikator kinerja tujuan dan sasaran dengan target kinerja berdasarkan data pencapaian target kinerja tahun 2024 serta prediksi pencapaian target kinerja tahun 2024 sebagaimana pada Tabel 3.2 berikut ini:

**Tabel 3.2.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Bina Marga,**  
**Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pinrang Tahun 2023**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2024	KET
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah berbasis elektronik dan dukungan kinerja pelayanan publik	Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah	84 (A)	
			Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah	91 (Sangat Baik)	
2	Menurunkan kesenjangan antar wilayah dalam penyediaan infrastruktur jalan, air minum, dan sarana/prasarana publik lainnya sesuai pemanfaatan ruang wilayah	Meningkatnya pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten, jalan pada Wilayah Kecamatan Batulappa, Duampanua, dan Lembang, dan sarana/prasarana publik lainnya	Kualifikasi panjang jalan kabupaten yang baik dan sedang	100%	
			Tingkat kemantapan jalan Kecamatan Batulappa, Duampanua dan Lembang	100%	
			Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	100%	



	Meningkatnya pelaksanaan fungsi penataan ruang wilayah sesuai peruntukannya	Ketaatan terhadap RTRW	100%	

Sumber : Renstra Dinas BIMACIPTA Kab. Pinrang 2019 – 2024

### 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Perumusan Program strategis DISBIMACIPTA pada penganggaran 2024 mengacu pada nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Penentuan pagu anggaran didasarkan pada keselarasan dan konsistensi Rencana Strategis dengan mempertimbangkan hasil capaian kinerja DISBIMACIPTA tahun sebelumnya, arah kebijakan, target dan indikasi pagu RKPD, analisis kebutuhan dan prioritas, usulan masyarakat serta usulan pemangku kepentingan lainnya.

Perumusan ini disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. merupakan program-program yang secara langsung mendukung pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Program strategis yang sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang adalah program - program strategis yang mendukung misi 1 dan

misi 5 Bupati dan Wakil Bupati Pinrang masa jabatan tahun 2019-2024 yaitu :

- (1) Misi 1, meliputi program yaitu :
  - (a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- (2) Misi 5, meliputi program yaitu :
  - (a) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
  - (b) Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional;
  - (c) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
  - (d) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
  - (e) Program Pengembangan Permukiman;
  - (f) Program Penataan Bangunan Gedung;
  - (g) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
  - (h) Program Penyelenggaraan Jalan;
  - (i) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Bupati dan Wakil Bupati Pinrang terpilih memiliki 15 (lima belas) program unggulan dan terdapat 2 (dua) program unggulan sesuai tugas dan fungsi pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang yaitu :

- (1) **Menyelesaikan infrastruktur jalan dan jembatan di dataran maupun pegunungan serta infrastruktur pemukiman dan kebutuhan listrik dalam waktu 2 tahun;**
- (2) Menyelesaikan infrastruktur pertanian dan perikanan (jalan tani dan saluran irigasi) dalam waktu 2 tahun;
- (3) Memenuhi kebutuhan bantuan traktor bagi seluruh kelompok tani dalam waktu 2 tahun;
- (4) Menjamin ketersediaan pupuk dan benih untuk sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan;
- (5) Mewujudkan pemberian layanan kesehatan dan Pendidikan gratis dan berkualitas dalam waktu 2 tahun;
- (6) Dalam kurun waktu 2 tahun, mewujudkan penyerapan 10.000 tenaga kerja baru;
- (7) Pemberian bantuan bagi 10.000 rumah tangga miskin dalam waktu 2 tahun;
- (8) Peningkatan bantuan rumah ibadah dan umrah serta peningkatan insentif bagi pegawai sara' dan tokoh agama lainnya;
- (9) Dalam 2 tahun mewujudkan iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan kesejahteraan melalui pemberian bantuan bagi 5.000 pelaku UMKM termasuk ibu rumah tangga;
- (10) Memberikan bantuan beasiswa mulai jenjang S1 hingga S3;
- (11) Memaksimalkan penataan kota untuk memenuhi fungsi *smart city* yang nyaman, elok, bersih, dan aman bagi warganya;

- (12) Menciptakan harmonisasi dan mewujudkan karakter masyarakat yang berlandaskan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal, budaya lokal, dan memaksimalkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif;
- (13) **Mempercepat pencapaian sasaran *sustainable development goals* (SDG's) sebagai komitmen global masyarakat Pinrang;**
- (14) Membangun perguruan tinggi berbasis potensi lokal dan penguasaan IT; dan
- (15) Transparansi dan akuntabilitas penyediaan barang/layanan publik berbasis E-Gov serta peningkatan kesejahteraan ASN dan honorer.

Berdasarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Pinrang masa jabatan tahun 2019-2024 diatas serta sesuai tugas pokok dan fungsi pelayanan perangkat daerah, maka Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang berkontribusi terhadap Misi 1 yaitu memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi dan Misi 5 yaitu melanjutkan, mengembangkan, memperbaiki, memelihara dan mengatasi kesenjangan infrastruktur dan sarana/prasarana publik, terutama di wilayah pegunungan Pinrang Utara serta 10 program dan 2 program unggulan terdiri atas program 1 yaitu menyelesaikan infrastruktur jalan dan jembatan di dataran maupun

pegunungan serta infrastruktur pemukiman dan kebutuhan listrik dalam waktu 2 tahun, dan program 13 yaitu mempercepat pencapaian sasaran *sustainable development goals* (SDG"s) sebagai komitmen global masyarakat Pinrang.

Berdasarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Pinrang masa jabatan 2019-2024 diatas, maka faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi dan program tersebut yang dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan**  
**Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang terhadap**  
**Pencapaian Visi, Misi, dan Program Unggulan Bupati dan Wakil**  
**Bupati Pinrang Masa Jabatan Tahun 2019-2024**

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pinrang yang Sejahtera, Religius, Harmonis, Mandiri dan Tangguh Mengelola Potensi Daerah				
No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Misi 1 : memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi  (a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; (b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; (c) Program Peningkatan	(1) Rendahnya kompetensi SDM aparatur dalam proses perencanaan, pelaksanaan, peranggungjawaban dan pelaporan, dan pengawasan dan pemeriksaan berbasis elektronik; (2) belum tersedia aplikasi sistem informasi dan manajemen keuangan dan kinerja lingkup Dinas; (3) Belum tersedianya	(1) Rendahnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah berbasis elektronik; (2) Rendahnya mutu pelayanan air minum; (3) Rendahnya mutu pelayanan air limbah domestik;	(1) Komitmen Pemerintah Daerah untuk memantapkan sistem birokrasi dengan didukung oleh TIK; (2) Komitmen Pemerintah Daerah untuk

	<p>Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah;</p> <p>(d) Program Peningkatan Informasi;</p> <p>(e) Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;</p> <p>(f) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;</p> <p>(g) Program Pengembangan Perumahan;</p> <p>(h) Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial; dan</p> <p>(i) Program Pengaturan Jasa Konstruksi</p> <p>Program Unggulan 13 : mempercepat pencapaian sasaran <i>sustainable development goals</i> (SDG's) sebagai komitmen global masyarakat Pinrang</p>	<p><i>database</i> rumah tangga bersanitasi di Daerah;</p> <p>(4) Belum optimalnya pengelolaan SPAM jaringan perpipaan meliputi pembangunan baru, peningkatan, perluasan dan pemeliharaan serta kompetensi pengelola;</p> <p>(5) Belum optimalnya pengelolaan SPALD meliputi perencanaan, pembangunan, sarana dan prasarana pengangkutan, IPLT, pengoperasian, pemeliharaan rutin /berkala, dan rehabilitasi serta peran swasta;</p> <p>(6) Belum optimalnya pengelolaan SPAM meliputi perencanaan, pengadaan lahan baru, dan pembangunan baru;</p> <p>(7) Belum optimalnya pelaksanaan STBM meliputi pemicuan, pnedampingan, hibah sarana dan prasarana, dan koordinasi lintas sektor serta peran swasta;</p> <p>(8) Kurangnya pembangunan IPLT baru beserta pemeliharaannya;</p> <p>(9) Belum optimalnya pengelolaan IPLT meliputi pengadaan kendaraan, pemeliharaan, dan petugas UPT serta kesadaran masyarakat;</p> <p>(10) Belum optimalnya pengembangan kompetensi pekerja jasa konstruksi;</p> <p>(11) Belum optimalnya pengawasan pekerjaan konstruksi di Daerah; dan</p> <p>(12) Belum tersedia anggaran bantuan stimulant rumah</p>	<p>(4) Rendahnya mutu pelayanan rumah layak huni bagi korban bencana; dan</p> <p>(5) Rendahnya mutu pelayanan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah.</p>	<p>mempercepat pencapaian target SDG's; dan</p> <p>(3) Komitmen Pemerintah Daerah untuk mencapai target SPM sebesar 100%.</p>
--	---	---	---	---

		layak huni untuk korban bencana.		
2	<p>Misi 5 : melanjutkan, mengembangkan, memperbaiki, memelihara dan mengatasi kesenjangan infrastruktur dan sarana/prasarana publik, terutama di wilayah pegunungan Pinrang Utara</p> <p>(a) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;  (b) Program Pembangunan Jalan dan jembatan;  (c) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;  (d) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;  (e) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan;  (f) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan; dan  (g) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong.</p> <p>Program Unggulan 1 : menyelesaikan infrastruktur jalan dan jembatan di dataran maupun pegunungan serta infrastruktur pemukiman dan kebutuhan listrik dalam waktu 2 tahun</p>	<p>(1) Belum optimalnya kegiatan pembangunan jalan berbasis data;  (2) Belum optimalnya kegiatan pembangunan jalan pada wilayah Pinrang Utara;  (3) Belum optimalnya kegiatan pemeliharaan ruas jalan/ bagian ruas jalan berbasis data;  (4) Belum optimalnya kegiatan pemeliharaan bangunan pelengkap jalan berbasis data;  (5) Belum optimalnya kegiatan pemeliharaan jalur dan /atau lajur lalu lintas dan bahu jalan berbasis data;  (6) Belum optimalnya kegiatan pemeliharaan berupa rehabilitasi dan rekonstruksi jalan berbasis data; dan  (7) Belum optimalnya pengelolaan sistem drainase perkotaan berbasis data meliputi perencanaan, pembangunan baru, normalisasi, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi serta peran masyarakat dan swasta.</p>	<p>(1) Kurangnya pembangunan infrastruktur jalan pada wilayah Pinrang Utara;  (2) Belum tuntasnya pembangunan infrastruktur jalan kabupaten; dan  (3) Kurangnya pembangunan bangunan pelengkap jalan.</p>	<p>Komitmen Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan infrastruktur jalan dan jembatan di dataran rendah dan pegunungan dalam waktu 2 tahun</p>

Adapun jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada Tahun 2024 dengan total Pagu sebesar Rp 103.987.341.886,- adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Program : 10
2. Jumlah Kegiatan : 20
3. Jumlah Sub Kegiatan : 69



The background features a complex network of white lines resembling a circuit board or data flow, overlaid with several hexagonal shapes in various colors (red, blue, green, yellow, purple, grey) that have a 3D effect. The text is centered in a bold, orange-brown font.

# BAB. IV

## Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 4.1 Program dan Kegiatan

Penyusunan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang tahun 2024 dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Renstra Dinas yang mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Secara umum pendanaan kegiatan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pinrang bersumber dari DAU, DAK, PAD serta Hibah.

Adapun program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan pelayanan Dinas Bina Cipta Kabupaten Pinrang tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pinrang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
									Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
													Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur		Target
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											103.987.341.886			117.679.790.660					
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											15.766.639.326			15.807.800.000				
1	03	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											235.190.087			237.800.000			
1	03	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	65.297.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			66.000.000					
1	03	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	7.229.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7.500.000						
1	03	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	8.075.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8.100.000						
1	03	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	8.075.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8.200.000						
1	03	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	14.108.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15.000.000						

1	03	01	2,13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			17 Dokumen		14.108.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15.000.000
1	03	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2 Laporan		132.403.887	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			133.000.000
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>2,02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>8.569.392.787</b>			<b>8.573.500.000</b>	
1	03	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			69 Orang/bulan		7.453.955.787	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7.455.000.000
1	03	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			3 Dokumen		166.698.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			168.000.000
1	03	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen		892.151.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			893.000.000
1	03	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan		18.128.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			19.000.000
1	03	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest SKPD	an oran eran		17 Laporan		38.458.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			38.500.000
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>2,03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>						<b>8.481.050</b>			<b>8.600.000</b>	
1	03	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			2 Dokumen		2.554.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.600.000

1	03	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			2 Laporan		5.926.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6.000.000
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>2,05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>295.490.900</b>			<b>316.500.000</b>		
1	03	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			2 Paket		71.386.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				72.000.000
1	03	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			5 Dokumen		24.104.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				24.500.000
1	03	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan			43 Orang		200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				220.000.000
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>2,06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>541.174.819</b>			<b>544.900.000</b>		
1	03	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket		19.798.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20.000.000
1	03	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket		7.763.058	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7.900.000
1	03	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			3 Paket		15.040.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15.500.000
1	03	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			2 Dokumen		21.402.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				21.500.000
1	03	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			1 Paket		19.975.761	Dana Transfer Umum-Dana				20.000.000



1	03	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan		266.180.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				266.500.000
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>2,09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>4.581.465.400</b>				<b>4.583.000.000</b>	
1	03	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			32 Unit		2.234.878.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2.235.000.000
1	03	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			122 Unit		2.234.878.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2.235.000.000
1	03	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit		39.355.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40.000.000
1	03	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			4 Unit		72.353.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				73.000.000
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>							<b>8.687.729.000</b>				<b>8.812.000.000</b>	
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>03</b>	<b>2,01</b>		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>8.687.729.000</b>				<b>8.812.000.000</b>	
1	03	03	2,01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun			1 Dokumen		363.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				380.000.000
1	03	03	2,01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan / Perluasan/Perbaikan SPAM		Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan SPAM	/Perluasan/Optimalisasi		1 Dokumen		417.335.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				420.000.000
1	03	03	2,01	03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun			0.6 Liter/Detik		732.007.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				735.000.000

1	03	03	2,01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat			0 SR		732.007.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				737.000.000
1	03	03	2,01	05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu			1.9 Liter/Detik		6.043.379.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				6.100.000.000
1	03	03	2,01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan							200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				220.000.000
1	03	03	2,01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu			45 SR		200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				220.000.000
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>							<b>1.893.907.150</b>					<b>1.921.000.000</b>
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>2,01</b>	<b>1</b>	<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>1.893.907.150</b>					<b>1.921.000.000</b>
1	03	04	2,01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun			1 Dokumen		363.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				370.000.000



1	03	04	2,01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS			450 Rumah Tangga	1.330.907.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.331.000.000
1	03	04	2,01	04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi			1 Unit	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			220.000.000
1	03	05			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>					<b>663.000.000</b>			<b>695.000.000</b>	
1	03	05	2,01		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>663.000.000</b>			<b>695.000.000</b>	
1	03	05	2,01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun			1 Dokumen	363.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			365.000.000
1	03	05	2,01	02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota			1 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			110.000.000
1	03	05	2,01	03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota			450 Rumah Tangga	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			220.000.000
1	03	06			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>					<b>3.241.548.000</b>			<b>12.093.748.410</b>	
1	03	06	2,01		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>3.241.548.000</b>			<b>12.093.748.410</b>	
1	03	06	2,01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun			1 Dokumen	363.000.000				365.000.000

1	03	06	2,01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan		Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun			58.7 M		363.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9.173.200.410
1	03	06	2,01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan		Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi			207000 M		2.515.548.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2.555.548.000
1	03	07			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>							<b>624.771.350</b>					<b>625.000.000</b>
1	03	07	2,01		<b>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>624.771.350</b>					<b>625.000.000</b>
1	03	07	2,01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			1 Sistem Jaringan		624.771.350					625.000.000
1	03	08			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>							<b>253.065.000</b>					<b>265.000.000</b>
1	03	08	2,01		<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>							<b>253.065.000</b>					<b>265.000.000</b>
1	03	08	2,01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG			250 Dokumen		153.065.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				155.000.000
1	03	08	2,01	03	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota		Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun			2 Dokumen		50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				55.000.000
1	03	08	2,01	05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota			1 Dokumen		50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				55.000.000
1	03	09			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>							<b>5.338.233.560</b>					<b>5.342.198.250</b>
1	03	09	2,01		<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>5.338.233.560</b>					<b>5.342.198.250</b>
1	03	09	2,01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota			1 Dokumen		130.831.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				131.000.000

1	03	09	2,01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan		Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya			1 Kawasan		3.720.198.240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3.721.198.250
1	03	09	2,01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya			2 Kawasan		1.487.204.200					1.490.000.000
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>10</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>						<b>66.230.467.400</b>				<b>70.822.044.000</b>		
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>10</b>	<b>2,01</b>	<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>						<b>66.230.467.400</b>				<b>70.822.044.000</b>		
1	03	10	2,01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian			1 Dokumen		363.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				365.000.000
1	03	10	2,01	03	Pengelolaan Leger Jalan		Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan			1 Dokumen		77.198.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				80.000.000
1	03	10	2,01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan		Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan			2 Dokumen		121.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				123.100.000
1	03	10	2,01	05	Pembangunan Jalan		Panjang Jalan yang Dibangun			15 KM		30.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				33.000.000.000

1	03	10	2,01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan				20 KM		15.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				16.500.000.000
1	03	10	2,01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				4.82 KM		50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				55.000.000
1	03	10	2,01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala				0.84 KM		30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				33.000.000
1	03	10	2,01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				4 KM		200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				220.000.000
1	03	10	2,01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun				83 M		18.684.944.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				18.685.944.000
1	03	10	2,01	18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi				30 M		1.204.325.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1.210.000.000

1	03	10	2,01	20	Pemeliharaan Berkala Jembatan		Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala			100 M		500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				550.000.000
1	03	12			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>						<b>1.287.981.100</b>						<b>1.296.000.000</b>
1	03	12	2,01		<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>						<b>722.404.100</b>						<b>728.000.000</b>
1	03	12	2,01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota			1 Dokumen		601.329.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				605.000.000
1	03	12	2,01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota			2 Dokumen		66.050.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				67.000.000
1	03	12	2,01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan ruang			1 Dokumen		55.023.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				56.000.000
1	03	12	2,02		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>399.300.000</b>					<b>400.000.000</b>	
1	03	12	2,02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota			2 Dokumen		399.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				400.000.000
1	03	12	2,03		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>48.670.000</b>					<b>49.500.000</b>	
1	03	12	2,03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah			1 Dokumen		18.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				18.900.000
1	03	12	2,03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang		Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang			1 Dokumen		30.520.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30.600.000
1	03	12	2,0		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>117.607.000</b>					<b>118.500.000</b>	

			<b>4</b>															
1	03	12	2,04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang				1 Dokumen		93.170.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				93.500.000
1	03	12	2,04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen		24.437.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				25.000.000
<b>TOTAL</b>												<b>103.987.341.886</b>					<b>117.679.790.660</b>	





**B A B V**

**Penutup**





## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **5.1 Kaidah – kaidah Pelaksanaan**

Kesepakatan dan penetapan dokumen perencanaan berupa RENJA-OPD, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Rencana kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Renja-OPD ini sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan, sekaligus sebagai bahan evaluasi kinerja OPD;
3. Renja-OPD akan dilakukan perubahan sebagaimana perlunya guna penyesuaian dengan RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2023 apabila terdapat revisi sebagai akibat penyesuaian dengan hasil evaluasi.
4. Kualitas penyusunan Rencana kerja akan sangat menentukan kualitas pelayanan Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pinrang yang diberikan kepada masyarakat yang memanfaatkan fasilitas tersebut.

#### **5.2 Rencana Tindak Lanjut**

Dengan ditetapkannya RKPD Tahun 2023, selanjutnya Renja Tahun 2023 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang merupakan acuan bagi sekretariat dan seluruh bidang yang ada di lingkungan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya.